

**EVALUASI GOOD GOVERNANCE DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(MUSRENBANG)  
STUDI KASUS MUSRENBANG DESA TEGAL KERTHA, KOTA  
DENPASAR**

Lalu Arman Mahadi, Dr. Piers Andreas Noak, SH.,M.Si.,  
Kadek Wiwin Dwi W, SE., M.AP .  
Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Udayana  
1021205008

E-mail: [Larman\\_viola@yahoo.com](mailto:Larman_viola@yahoo.com), [andreas.noak@yahoo.com](mailto:andreas.noak@yahoo.com),  
[orange\\_just@yahoo.com](mailto:orange_just@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Village development planning or commonly called village Musrenbang is an annual forum for stakeholders both from the government, private sector, and from the general public to discuss the development in their village. However, the process and the implementation planning forums at village level is not in accordance with what has been announced by the central government, Musrenbang happened only as a formality to meet the agenda of the annual work program without directly involving public participation, as it happens in Tegal Kertha village, the city of Denpasar. Looking at the problem, the purpose of this study is the evaluation of the implementation Musrenbang at the village level and also to determine what factors causing low levels of citizen participation in village Musrenbang.*

*This study used a qualitative descriptive method to obtain the data, researchers conducted by direct observation to occurred the phenomenon in the field and conduct in-depth interviews to informant that related with the implementation of village Musrenbang in tegal Kertha village, Denpasar.*

*The conclusion of this research is the level of public participation is still very low in the process of implementation of village Musrenbang in tegal kertha is due to a lack of good information about the process of Musrenbang itself to the public and also the lack of binding rules that are applied directly from the central government or in accordance with the constitution so the stakeholders implemented the annual program just as a formality to meet the program works without involving the direct public participation of the community.*

*Keywords : village Musrenbang, public participation, Good Governance*

## PENDAHULUAN

Dengan diterapkannya otonomi daerah dan azas desentralisasi seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, lahirlah *local government* (pemerintah daerah) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah di dalam kegiatan untuk menyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektivitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), Partisipasi (*participation*), Akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*).

Salah satu prinsip *good governance* yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat karena merupakan salah satu indikator atau ciri-ciri eksistensi sistem pemerintahan yang demokratis dimana partisipasi masyarakat di sini tidak hanya dilihat dari sebatas sebagai keterlibatan saja, namun juga dari berbagai aktivitas lain yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak. Misalnya di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat yang paling sederhana yaitu di tingkat desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi istilah yang cukup dikenal dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan di desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana-rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan di daerah. Sedangkan untuk Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa adalah forum masyarakat tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pelaku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat desa adalah forum perencanaan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para *stakeholders* yang bermakna akan mampu membangun musyawarah yang dialogis tentang kepentingan dan kemajuan desa. Namun pada pelaksanaannya, Musyawarah perencanaan pembangunan

(musrenbang) sering kali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis karena masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan membuat penerapan *Good Governance* belum mampu sepenuhnya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Padahal forum Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ini merupakan salah satu forum agar masyarakat bisa ikut berperan aktif di dalam pembangunan dan salah satu tujuan dari Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ini adalah untuk menentukan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota atau sumber dana lain.

Terutama seperti yang terjadi di Desa Tegal Kertha dimana musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tahun 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dimana di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai unsur-unsur masyarakat di dalam atau konsep *e-government* pada masing-masing instansi pemerintah.

desa itu sendiri. Namun kenyataan yang terjadi adalah forum masyarakat tahunan ini hanya milik para pelaku

kepentingan di desa tanpa melibatkan unsur-unsur lain di dalam masyarakat seperti yang tercantum di dalam petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa tersebut.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) terkesan hanya dijadikan sebagai kegiatan formalitas saja tanpa melibatkan berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat sehingga aspirasi yang terjaring untuk dibawa ke tingkat kecamatan bukan murni dari aspirasi masyarakat, melainkan sudah tercampur oleh urusan-urusan para pelaku kepentingan itu sendiri sehingga pendekatan pembangunan secara *bottom-up planning* yang dicanangkan oleh pemerintah yang mencerminkan sikap demokratis tidak terimplementasikan dengan baik untuk mendukung terciptanya *Good Governance*. Permasalahan di atas menarik peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul “Evaluasi *Good Governance* dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), studi kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar “.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam prinsip-prinsip *Good Governance* terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang diacu dalam Harahap (2001), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses

perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Survey partisipasi oleh The International Association of Public Participation telah mengidentifikasi nilai inti partisipasi sebagai berikut (Delli Priscolli, 1997), yang diacu dalam Daniels dan Walker (2005):

1. Masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan.
3. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan proses semua partisipan.
4. Proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk terpengaruh.
5. Proses partisipasi masyarakat melibatkan partisipan dalam mendefinisikan bagaimana mereka berpartisipasi.
6. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan.
7. Proses partisipasi masyarakat memberi partisipan informasi

yang mereka butuhkan dengan cara bermakna.

Partisipasi masyarakat di dalam penelitian ini akan menjadi pisau analisis dan dapat membantu untuk mengetahui seperti apa dan sejauh mana pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa melibatkan segala unsur dari masyarakat demi tercapainya proses musyawarah yang demokratis dan juga mendukung terciptanya *Good Governance*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian tentang evaluasi *good governance* dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) studi kasus di Desa Tegal Kertha, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pertimbangannya bahwa pendekatan ini mampu mengungkap secara lebih tajam dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Selanjutnya karena deskriptif kualitatif ini tidak hanya bergerak di tingkat permukaan (*surface behavior*), tetapi juga mampu bergerak hingga ke tingkat yang paling dalam (*tacid knowledge*). Selain itu, pendekatan kualitatif akan membimbing penulis untuk memperoleh fenomena-fenomena yang tidak terduga sebelumnya. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati dengan

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka mengenai dunia sekitarnya.

Metode penelitian ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali akar fenomena dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Tegal Kertha, terutama dari unsur partisipasi masyarakat. Kemudian setelah berbagai fenomena dapat digali, kemudian data diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan kondisi yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam temuan penelitian bahwa proses musrenbang di Desa Tegal Kertha yang hanya bersifat formalitas ini tanpa mengikuti petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah bappenas yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat seluruh lapisan masyarakat terutama dari kaum perempuan dan golongan miskin di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa tersebut demi mendukung terciptanya *Good Governance* yang berdampak pada tidak efektifnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dan keterwakilan masyarakat sipil yang masih rendah serta ketidaktahuan masyarakat umum tentang adanya kegiatan Musrenbang ini tentu berdampak besar pada proses dan pelaksanaan Penyelenggaraan forum tahunan desa atau Musrenbang desa ini.

Padahal pada umumnya sebenarnya Musrenbang haruslah mengikutsertakan para pemuda dan pemudi yang ada di desa tersebut, apalagi jika di Bali, STT

atau seka teruna-teruni merupakan organisasi adat bagi kaum muda yang sudah sepantasnya ikut serta dalam proses pelaksanaan dan perencanaan bagi pembangunan berkelanjutan yang ada di desa

Musrenbang di tingkat desa ini hanya sebagai forum tahunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara utuh yang menyebabkan tercorengnya proses demokrasi di tingkat yang paling kecil seperti di tingkat desa ini. Belum lagi hasil wawancara dengan masyarakat pendatang pelaku bisnis dan pegawai swasta yang ada di Desa Tegal Kertha, yang menunjukkan bahwa mereka juga tak pernah dilibatkan atau diinformasikan tentang adanya Musrenbang.

Peneliti juga melihat bahwa ada komunikasi yang terputus antara masing-masing satuan kerja perangkat daerah dikarenakan adanya jawaban yang berbeda-beda baik tentang aturan maupun petunjuk mengenai musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Kepala dusun disini hanya melakukan koordinasi pada ketua lingkungan maupun tokoh masyarakat karena sudah dianggap mewakili aspirasi dari warga yang tinggal di lingkungannya tersebut. Tanpa adanya partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui musrenbang di tingkat desa ini sebagaimana diamanatkan baik dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, maka bisa

terbilang proses demokrasi tidak berjalan dengan baik yang mana seharusnya proses pendekatan pembangunan yang dipakai adalah *bottom-up planning* atau proses yang memulai dari bawah kemudian diakomodir hingga di atas, bukan malah sebaliknya.

Dari sisi anggaran sendiri disini menggunakan skala prioritas yang mana pengeluaran yang disanggupi oleh desa adalah anggaran di bawah dari nominal lima puluh juta rupiah karena terkait kemampuan desa itu sendiri, sedangkan yang di atas nominal lima puluh juta rupiah akan diusulkan dan diakomodir kembali ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan.

Kepala Desa yang sekarang ini pun menambahkan akan berjanji melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan di musrenbang desa yang rencananya akan dilakukan sekitar bulan oktober nanti karena beliau baru menjabat selama beberapa bulan menggantikan kepala desa yang lama, yang mana sesuai dengan konstitusi yang berlaku apalagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 maka sudah sepantasnya masyarakat harus ikut dan dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Selain itu, perubahan tentang kepemimpinan Kepala Desa dari jabatan 5 tahun menjadi jabatan selama 6 tahun sesuai dengan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 tentang Desa ini juga ikut mempengaruhi RKP Desa yang juga jangka waktunya menjadi 6

tahun sesuai dengan kepemimpinan kepala desa.

Padahal baik petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan sangat diperlukan terlepas dari aturan yang melekat pada konstitusi yang hanya bersifat mengatur, karena tanpa adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersebut tentu saja proses musyawarah perencanaan pembangunan di desa ini tidak akan berjalan dengan baik dan bersifat partisipatif apabila tidak mendapatkan panduan dari pihak yang bersangkutan yang mana proses demokrasi dan *good governance* terasa menjadi percuma tanpa adanya partisipasi masyarakat di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Padahal Bappenas sendiri sudah mengeluarkan sebuah buku panduan mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa walaupun belum tersampaikan secara langsung baik kepada Bappeda maupun pada perangkat di pemerintahan Desa, tapi Bappeda Kota Denpasar tidak mengetahuinya dan beranggapan bahwa buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan itu hanya mengacu pada konstitusi seperti undang-undang dan peraturan.

Terlihat sekali bagaimana ada terjadi komunikasi yang terputus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah oleh sebab adanya otonomi daerah ini, yang mana kejadian seperti ini seharusnya bisa diantisipasi dan dicegah karena akan mempengaruhi satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Belum lagi tentang pengawasan terhadap

Musrenbang di tingkat Desa yang cenderung terlihat dilaksanakan sendiri oleh desa tanpa adanya bantuan ataupun pengawasan baik dari bappeda maupun dari kecamatan terhadap pelaksanaan Musrenbang tersebut.

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang belumlah memadai, aturan yang dibuat seakan tidak terakomodir dengan baik di tingkat yang paling rendah seperti di desa. Aturan seakan-akan hanya dibuat di pusat tanpa diteruskan dengan baik hingga ke tingkat pelaksana sehingga berdampak kurang baik terhadap penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa ini. Perbedaan pandangan mengenai aturan ataupun petunjuk teknis baik dari kepala desa, bappeda dan bagian hukum sekretariat daerah kota Denpasar untuk pelaksanaan Musrenbang ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan besar kenapa hal seperti ini bisa terjadi.

### **Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tegal Kertha**

Dalam menggali informasi terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan penelitian terutama kepada informan kunci. Dalam bagian ini akan dibahas hasil temuan penelitian secara umum. Adapun dalam wawancara yang dilakukan akan berfokus pada segala informasi mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

desa yang seharusnya mampu menyerap partisipasi masyarakat paling banyak karena musyawarah di Desa merupakan tingkat proses perencanaan yang paling dasar dari keseluruhan proses musrenbang ini, tapi pada kenyataannya banyak desa yang melakukan proses kegiatan musrenbang ini hanya sekedar menjadi formalitas tahunan tanpa adanya tingkat partisipasi masyarakat yang sesuai dengan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.

Dari perangkat desa sendiri seperti tidak ada usaha untuk melakukan proses demokrasi dalam melakukan kegiatan di tingkat desa, yang mana menjadikan proses kegiatan yang berlangsung di desa hanya sebagai formalitas ataupun kegiatan rutin tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung yang tentu sangat berlawanan terhadap apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, dimana seharusnya masyarakat bisa berpartisipasi langsung baik dalam perencanaan, proses maupun pada tahap pelaksanaan karena tingkat desa merupakan tingkat yang paling memungkinkan untuk menjaring aspirasi masyarakat di desa secara langsung terhadap proses pembangunan yang akan dilakukan.

hal ini menyebabkan musrenbang berjalan tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam konstitusi. Konsep musyawarah sendiri menunjukkan bahwa forum Musrenbang ini haruslah bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk menyepakati sesuatu dan

berakhir pada pengambilan keputusan bersama atau pengambilan kesepakatan, bukanlah seminar atau sosialisasi informasi. Jadi, jangan sampai proses Musrenbang ini disusun sebagai suatu acara seremonial yang bersifat formalitas atau seremonial yang separuh atau sebagian besar dari isi di dalam kegiatan tersebut diisi dengan sambutan atau pidato-pidato, apalagi sampai ada unsur politik di dalamnya, karena pada hakekatnya inti dari pelaksanaan Musrenbang adalah partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama memikirkan cara dan solusi terbaik demi memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Seringkali kelompok miskin tidak terlibat dalam forum publik, entah karena merasa tidak mampu berperan serta dalam forum yang biasanya diikuti oleh anggota masyarakat terpendang, ataupun karena ketidaktahuan mereka terhadap adanya proses Musrenbang di tingkat Desa ini. Begitu juga dengan kelompok perempuan seringkali tidak terlibat dalam forum publik karena beranggapan itu adalah kegiatan laki-laki dan kalangan elit masyarakat. Kelompok miskin harus benar-benar didorong untuk hadir dan terlibat dalam Musrenbang karena prioritas pembangunan harus berpihak kepada kalangan yang paling ketinggalan dalam hal kesejahteraan, kelompok perempuan juga seharusnya ikut menentukan apa yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama sudut kepentingan perempuan, anak-anak, dan keluarga.

Tak ketinggalan juga peran dari para kaum generasi muda yang tergabung dalam Seka Teruna-Teruni

(STT) di masing-masing banjar haruslah mengetahui serta mengikuti proses serta pelaksanaan Musrenbang desa ini, apalagi anak muda sekarang yang cenderung lebih kritis dan berpikir lebih jauh ke depan tentu akan sangat berguna bagi kemajuan desa ke depannya melalui proses seperti Musrenbang di tingkat desa ini.

Kewajiban untuk mengajak maupun menginformasikan bahwa Musrenbang ini dapat diikuti secara partisipatif oleh masyarakat juga harus dikumandangkan lebih oleh para perangkat desa dan juga kepala dusun, karena dari sebagian besar orang yang peneliti wawancara mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak pernah diberi informasi yang detail mengenai pelaksanaan Musrenbang desa ini yang tentunya berakibat pada sangat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tegal Kertha di dalam forum tahunan Musrenbang ini.

Adapun indikator evaluasinya adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas : Jika mengacu pada efektif atau tidaknya tingkat partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan di desa, tentu saja tingkat kehadiran masyarakat di dalam proses maupun pelaksanaan Musrenbang ini menjadi sangat vital, karena sasaran utama dari proses musyawarah ini adalah tingkat kehadiran dari unsur masyarakat, bukan hanya dari kalangan pemerintahan saja, yang mana seperti yang terjadi di Desa Tegal Kertha dimana sangat minim sekali bahkan nyaris tidak ada unsur masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya yang artinya pelaksanaan Musrenbang di Desa Tegal



Kertha masih sangat jauh dari kata efektif seperti yang seharusnya.

2. Efisiensi : ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin sesuai penggunaan sumber daya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Jadi di dalam proses maupun pelaksanaan Musrenbang di Desa Tegal Kertha ini belumlah efisien mengingat minimnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa.

3. Kecukupan : Pencapaian Musrenbang akan dikatakan memenuhi indikator kecukupan atau berhasil menggunakan demokrasi dengan baik apabila tingkat kehadiran pemerintah sebanding atau sesuai dengan porsi dengan unsur dari masyarakat serta kalangan swasta yang hadir dan ikut serta baik dalam proses maupun pada tahap pelaksanaannya, yang dimana bahkan dalam proses musrenbang Desa Tegal Kertha belum mampu mencakup hal-hal tersebut. Belum lagi hasil dari Musrenbang desa yang harus diakomodir ke tingkat kecamatan juga merupakan salah satu unsur dari indikator kecukupan di dalam Musrenbang tersebut.

4. Pemerataan : tingkat pemerataan yang masih belum memadai karena tingkat keterwakilan dari berbagai kalangan dalam Musrenbang belum tersosialisasi dengan baik, padahal seharusnya baik dari kalangan swasta, golongan miskin maupun dari unsur perempuan haruslah diikutsertakan dalam proses serta pelaksanaan Musrenbang agar terjadi pemerataan seperti yang sudah dicantumkan pemerintah lewat petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh bappenas.

5. Responsivitas : Masyarakat yang masih cenderung apatis dan belum mendapatkan sosialisasi yang mendalam mengenai musrenbang secara garis besar dari para perangkat desa mempengaruhi tingkat responsivitas masyarakat terhadap adanya musrenbang, bagaimana mereka mau merespon kalau ada atau tidaknya kegiatan musrenbang tersebut saja mereka tidak tahu dan tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dan benar dari pemerintah.

6. Ketepatan : Ketepatan dari tujuan Musrenbang ini sendiri adalah terakomodirnya keinginan masyarakat yang telah disampaikan langsung dalam proses Musrenbang sehingga menjadi sebuah kegiatan yang nyata yang diperlukan oleh masyarakat di desa itu sendiri, baik jika kegiatan tersebut dianggarkan oleh kecamatan karena sudah terakomodir dari desa ataupun melalui proses swadaya desa itu sendiri. Dan dalam hal ini hasil dari pelaksanaan Musrenbang tersebut belum menemui titik ketepatan karena tingkat partisipasi masyarakat yang minim sehingga kepentingan-kepentingan yang terakomodir ke kecamatan cenderung terlihat sebagai unsur politis dari para perangkat desa.

#### **4.4 Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Tegal Kertha**

Musrenbang yang dilaksanakan di Desa Tegal Kertha ini tentu tidak sesuai dengan aturan yang mana tingkat partisipasi masyarakatnya sangat kurang, bahkan aspirasi pun tidak terserap secara baik karena tidak adanya forum khusus yang dibuat oleh para

pejabat desa untuk menampung segala keluhan maupun aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan di desanya. Kepala dusun pun terkesan tidak menjalankan amanah dengan baik untuk menampung aspirasi masyarakatnya karena tidak adanya forum khusus di masing-masing dusun untuk membahas tentang Musrenbang yang akan mempengaruhi pembangunan yang terjadi di desa tempat mereka tinggal, belum lagi pada pelaksanaannya Musrenbang desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh hingga ke kaum miskin dan kaum perempuan yang seharusnya dilibatkan demi tercapainya Musrenbang desa yang bersifat demokratis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ; (1) Pelaksanaan Musrenbang desa di Tegal Kertha dilaksanakan secara formalitas, mengingat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai mekanisme musrenbang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik aturan berupa petunjuk teknis dari bappenas maupun perda-perda yang sudah diatur oleh masing-masing kepala daerah. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Tegal Kertha berada pada tingkat kehadiran masyarakat sangat rendah bila dibandingkan dengan kehadiran aparat pemerintah desa, padahal seharusnya masyarakat terutama dari golongan miskin dan perempuan harus diikutsertakan baik di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa tersebut.

(2) Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa

Tegal Kertha adalah durasi waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan akses informasi Musrenbang baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan yang kurang terbuka dan terkesan tidak disebarluaskan pada masyarakat, padahal Musrenbang ini sejatinya adalah forum tahunan milik masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembangunan yang terjadi di desa mereka, dan juga penganggaran yang kurang transparan serta tidak ada hasil yang konkrit yang diberikan secara langsung pada masyarakat terkait aspirasi yang mampu diakomodir dari Musrenbang di tingkat desa ke tingkat yang lebih atas seperti kecamatan maupun kabupaten/kota.

(3) Usulan masyarakat dalam Musrenbang Desa Tegal Kertha belum konsisten, mengingat minimnya tingkat partisipasi masyarakat yang tentunya berdampak pada usulan masyarakat yang sangat minim dari hasil musrenbang mulai dari tingkat desa sampai kecamatan yang bisa diakomodir oleh para pejabat desa yang berwenang. (4) faktor pengawasan atau *controlling* yang lemah dari pemerintah pusat untuk mengawasi pelaksanaan terkait Musrenbang desa agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak ada unsur politis di dalam pelaksanaan Musrenbang dan juga agar sesuai dengan aturan yang berlaku

Tidak adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah seperti desa secara tidak langsung melemahkan aturan Musrenbang desa yang sudah dibuat karena tanpa adanya pengawasan, bisa

saja hasil maupun usulan Musrenbang desa yang diusulkan ke tingkat kecamatan berisi unsur-unsur politis bagi pihak yang berkepentingan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah di dalam proses pelaksanaan Musrenbang di Desa Tegal Kertha, ini disebabkan karena kurangnya informasi baik tentang proses Musrenbang itu sendiri kepada masyarakat secara umum dan dari pihak desa, juga karena kurangnya kerangka aturan yang mengikat yang diterapkan langsung dari pusat ataupun yang sesuai dengan konstitusi tidak sampai ke pemerintah daerah apalagi di tingkat desa sehingga para pejabat desa hanya melaksanakan kegiatan tahunan itu sebagai formalitas untuk memenuhi program kerjanya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dengan alasan bahwa aturannya pun tidak ada dari pemerintah pusat. Selain itu, pengawasan yang lemah baik dari kecamatan maupun Bappeda setempat kepada pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa juga ikut menyebabkan Musrenbang desa ini terkesan hanya sebagai pelengkap program kerja tahunan desa tanpa mengikuti alur serta proses yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan Musrenbang di Desa Tegal Kertha ini kurang efektif, antara lain: Pertama, lemahnya pemahaman kerangka peraturan (regulatory framework) dari perencanaan dan

penganggaran dalam Musrenbang. Kedua, kurangnya kerangka peraturan yang jelas pada tingkat daerah. ketiga, lemahnya kapasitas staf dalam mengelola perencanaan partisipatif. Keempat, lemahnya keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan.

Melihat permasalahan yang dialami pada proses Musrenbang ini, dapat dilihat bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah belum cukup matang untuk memaksimalkan konsep *Good Governance* terutama dari sisi partisipasi masyarakat yang masih sangat minim tingkat partisipasinya padahal sudah ada aturan serta petunjuk pelaksanaannya namun hanya sebatas aturan yang tidak digunakan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran mengenai partisipasi masyarakat di dalam Musrenbang di tingkat Desa antara lain Perlu Penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh para perangkat desa maupun oleh masyarakat setempat tanpa mengurangi prinsip-prinsip partisipatif itu sendiri serta Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan maupun SKPD dalam pemberian informasi kepada masyarakat terutama di Desa Tegal Kertha. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses

tersebut. Pemerintah pusat terutama Bappenas harus menyampaikan ataupun memberikan buku panduan terkait dengan pelaksanaan Musrenbang desa ke pemerintah daerah, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman mengenai aturan yang mengatur tentang proses pelaksanaan Musrenbang terutama di tingkat desa yang harusnya dihadiri oleh masyarakat.

Untuk masyarakat haruslah tidak bersikap apatis terhadap pemerintahan serta berusaha mencari informasi dan mengikuti segala kegiatan yang ada di desa demi tercapainya proses demokrasi yang baik di desa tersebut dan juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan, terutama Musrenbang di tingkat desa.

### Referensi:

- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, William.N (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Labolo, Muhammad (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubiyarto (1984), *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Ali, Faried (2011). *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode r&d*. Bandung: alfabeta.

- Soenarko. 2000. *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintahan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Puspitosari, H., & Kurniawan, K. L. (2012). *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pratikno.(2007). *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Kepemerintahan Daerah: Kemitraan, Partisipasi, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jogja Global Media